



STRATEGI MENGHADAPI SISTEM KAPITALISME EKONOMI GLOBAL

KOMARI*

* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: komari.m.sy@gmail.com

ABSTRAK

Sejak Khilafah dihancurkan dan sistem politik kufur diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin, politik Islam tersingkir. Pada saat itulah masuk berbagai konsep pemikiran Barat yang ditegakkan di atas ideologi kapitalisme, ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan (fahlu adalah-din an al-hayat). Tidak terkecuali juga Indonesia banyak yang kelaparan, miskin, tertindas, dirampas harkat dan martabatnya sebagai manusia, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Kapitalisme merupakan sistem yang selalu memelaratkan terhadap bangsa Indonesia, Kapitalisme yang selalu berganti wajah untuk menjajah Indonesia dari kolonialisme atau imperialisme pada masa sebelum dan ketika orde lama, developmentalisme pada masa orde baru kemudian sekarang menjelma menjadi globalisasi selalu tidak pernah membawa nasib baik di negeri kita, bangsa kita ibarat kuli di negeri sendiri. Ini semua sebagai kompensasi atas terlibatnya kepentingan. Dari sinilah maka Indonesia mengalami ketergantungan dalam segala bidang (Politik, Ekonomi, Hukum).

Kata Kunci : Strategi, Sistem Kapitalisme, Global

Pendahuluan

Nama Indonesia tidak pernah lepas dari konstelasi dunia (*global*). Dalam sejarah Indonesia, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia sering dikendalikan oleh wacana “asing” yang kadang berwatak *Imperialistik*.¹

Indonesia bukan hanya masuk dalam wacana (*Barat*) akan tetapi juga masuk dalam cengkraman *Kapitalisme* yang sangat hegemonik, mulai dari awal berdirinya hingga saat ini. Indonesia dijajah dan dikendalikan, misalnya dalam aspek: social, politik, ekonomi, ideology, kebudayaan dan seterusnya.²

Gurita *Imperialisme* yang hegemonik, yang menelikung dan menjajah bangsa Indonesia (*juga negara berkembang/negara dunia ke-tiga*) itu bernama kapitalisme ekonomi. Dominasi kapitalisme ekonomi ini hampir menyeluruh dan total. Dari dulu hingga kini, betapa banyak peristiwa dan sejarah di tanah air yang dicampurtangani bahkan dibikin/direkayasa oleh kapitalisme ekonomi demi kepentingannya. Kita kadang terperangah dan sama sekali tidak menyadari hal itu. Sebut saja diantaranya drama politik PKI dan keruntuhan orde lama dimana terjadi konspirasi antara CIA dengan Soeharto,³ ketergantungan ekonomi negara miskin terhadap kepentingan para pemodal yang berasal dari negara kaya sehingga peranan pemerintah dalam negara miskin cenderung mengalami perubahan fungsi, yaitu dari melayani dan melindungi kepentingan rakyat menjadi melayani dan melindungi kepentingan para pemodal International yang ingin atau telah menanamkan modalnya di negara-negara yang bersangkutan. Pada tingkat yang paling ekstrim, kebijakan ekonomi pemerintah negara-negara miskin justru secara terang-terangan mengambil

¹ Hasyim Wahid, dkk, *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS, 1999), h. 1

² *Ibid*, h. 1

³ *Ibid*, h. vi

posisi berlawanan dengan aspirasi rakyat mereka sendiri.⁴ Dan masih banyak lagi persoalan yang memang menjadi skenario kapitalisme ekonomi.

Maka, sebuah upaya untuk melakukan perubahan di tanah air, tanpa mengaitkannya dengan struktur kapitalisme, tentu akan menemui jalan buntu. Soal upaya demokratisasi tidak sekedar berhadapan dengan negara (kekuasaan), militer, elit politik, elit ekonomi dan semacamnya, akan tetapi secara lebih luas dan lebih dalam akan berhadapan dan membentur struktur kapitalisme yang dominatif dan hegemonic.⁵ Hal ini sesuai dengan pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia “*Perjuangan kamu lebih berat dari pada perjuanganku, kalau aku berjuang musuh yang aku hadapi sangat jelas mereka adalah orang Belanda yang menerapkan sistem kolonialisme di Indonesia akan tetapi musuh yang kamu hadapi nanti berasal dari bangsa kamu sendiri*”⁶.

Di Indonesia yang pada awalnya menerapkan suatu sistem ekonomi yang *tendens* ke arah sosialisme saat orde lama, berganti dengan politik *developmentalisme* yang diterapkan oleh orde baru sebagai kompensasi atas terlibatnya kepentingan Amerika dalam penggulingan orde lama. Sehingga kapitalisme adalah suatu pilihan dari sistem yang diterapkan untuk mempercepat laju industrialisasi dari *under developmentalisme* menuju negara *developmentalis*. *Developmetalisme* yang merupakan wajah baru dari *kapitalisme ekonomi* ingin mendikte bangsa Indonesia lewat IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia lainnya yang merupakan konsorsium kapitalis. Hal ini menjadi sangat berperan dalam menciptakan ketergantungan modal dengan memberikan penalangan utang luar negeri kepada negara-negara berkembang dan berhak memberikan ketentuan-ketentuan yang intervensionis terhadap kebijakan pembangunan negara-negara berkembang.

⁴ Revrisond Baswir, *Bahaya Ekonomisasi Neoliberal Bagi Negara-negara Miskin*, (Surabaya: FE Unair), h. 1.

⁵ Hasyim Wahid, dkk, *Telikungan Kapitalisme Global...*, h. vi

⁶ Soekarno, *Penemuan Kembali Jalannya Revolusi Kita*, (Pidato pada Tanggal 17 Agustus 1959).

Strategi Penguatan Sosial (*Macht Vorming*)

Untuk memenangkan perlawanan *Kapitalisme Ekonomi* kita harus mengukur kekuatan-kekuatan masyarakat, termasuk umat Islam yang ada di Indonesia. Karena umat Islam Indonesia mayoritas lebih dari 90% maka modal pokok dari adalah “*konsentrasi kekuatan Islam Indonesia bukan perpecahan kekuatan Islam di Indonesia*”. Kekuatan umat Islam Indonesia ini adalah kekuatan pokok dan lebih baik jika kita dapat menguatkan masyarakat yang baragama lain, karena yang akan terjadi adalah kekuatan seluruh bangsa Indonesia yang dipelopori oleh umat Islam dalam melawan *kapitalisme ekonomi*. Dengan kekuatan inilah maka perlawanan kita menjadi mudah untuk mengalahkan musuh sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ (الصف: ٤)

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang kokoh*” (As-saf ayat- 4)

Dan kekuatan inilah sebenarnya kekuatan yang maha dasyat dengan modal semangat perjuangan yang tak akan terkalahkan sampai matinya *kapitalisme*. Ada dua tahapan dalam membangun kekuatan ;

1. Membangun Kekuatan Sosial (*Macht Vorming*)

Macht vorming adalah pengorganisirannya massa, oleh karena itu untuk membangun kekuatan sosial harus ada “*konsentrasi kekuatan*” agar kekuatan ini dapat dipersatukan maka segala pertentangan yang terdapat dalam “*bangsa*” dan “*rakyat*” ini harus segera diselesaikan misalnya “*pertentangan antar umat Islam sebagaimana yang terjadi dalam partai Islam dan ormas Islam saat ini, pertentangan antar suku padahal sama-sama muslimnya, pertentangan antar agama*”, setelah kita selesai membangun kekuatan

bangsa di Indonesia maka kita akan membangun kekuatan dengan bangsa yang menentang *kapitalisme* ekonomi. Penyatuan kekuatan inilah yang menjadi modal utama kita untuk ber melawan *kapitalisme* ekonomi demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur serta mencapai dasar/dasar dari perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Hal ini sesuai dengan Piagam madinah Pasal 18 (*Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain*)⁷.

2. Penayadaran Sosial (*Macht Wending*)

Pada tingkatan ini manusia dengan kemampuan berfikirnya mengaktualisasikan pada perilaku kehidupan di masyarakat. Sifat dasar manusia yang ingin merdeka secara lahir dan bathin adalah power yang tiada habisnya untuk melepaskan himpitan hidup yang menimpa diri manusia tersebut.

Pada prinsip yang ingin lepas dari himpitan dan penindasan inilah *Mujahid* dalam melakukan penayadaran terhadap umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, supaya masyarakat sadar dan mau bergerak, membangkitkan semangat untuk keluar lepas merdeka dari penjajahan *kapitalisme ekonomi*.

Pergerakan memang pasti lahir, pasti hidup walaupun obat tidur yang bagaimana juga manjurnya walaupun terang-terang dirintangi oleh musuh dengan rintangan yang bagaimanapun juga selama nasib kita masih nasib yang sengsara. Memang pergerakan lahir karena pada hakekatnya dilahirkan oleh tenaga-tenaga pergaulan hidup sendiri. Dengan tenaga kita sendiri dengan mempunyai bentukan pergerakan yang seksama, konstruksi pergerakan yang harus cocok dan sesuai dengan hukum-hukumnya

⁷ Lukman Hakim, *Revolusi Sistemik*, (Malang: Kreasi Wacana, 2003), h. 334

masyarakat dan terus menuju kearah idealnya masyarakat, yakni masyarakat yang selamat dan sempurna.⁸

Oleh karena itu ketika penyadaran merupakan tahapan yang paling urgen, penyadaran ini bisa kita lakukan terhadap seluruh elemen bangsa baik yang ada di struktural maupun tidak.

Dari pengorganisasian masa (*macht Vorming*) dan penyadaran masa (*macht wending*) yang merupakan faktor pendukung dapat disimpulkan menjadi tiga;

- a. *Pertama*, penguatan peran sosial dan politik kaum ulama.
- b. *Kedua*, penguatan akal kultural Islam di basis massa (*grass-root*).
- c. *Ketiga*, partisipasi politik kekuatan Islam dan kerjasama politik dengan berbagai unsur yang mendukung cita-cita ini.

Sementara itu, titik tolak bagi tuntutan apapun adalah syarat mutlak untuk mempertahankan kepentingan pekerja. Tuntutan-tuntutan gerakan harus ditujukan untuk mulai dari keprihatinan-keprihatinan langsung para buruh dan keluarga mereka serta merumuskan solusi yang meningkatkan pemahaman mereka tentang watak tak terdamaikan dari berbagai kepentingan kelas dalam masyarakat. Lewat perjuangan tuntutan-tuntutan ini, para buruh akan meningkatkan kesadaran mereka akan perlunya menggulingkan *kapitalisme* dan mengadakan tranformasi sosialis atas masyarakat.

Ketika para pengusaha mulai menjerit bahwa mereka tidak bisa membayar tuntutan sederhana para buruh tersebut, kita akan meminta para pekerja memeriksa rekening para pengusaha itu. Maka mereka akan mempelajari ke mana perginya kekayaan yang dihasilkan oleh keringat dan darah mereka. Mereka akan belajar mekanisme laba kapitalis. Kita tidak

⁸ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Panitya Penerbit, 1964), h. 30-31

hanya akan menuntut hal ini di tingkat pabrik atau perusahaan, namun juga pada tingkat seluruh masyarakat.

Secara lebih umum, kita harus mengusulkan program untuk reorganisasi total masyarakat lewat transisi dari *kapitalisme* ke *sosialisme*. Dan pada saat ini Indonesia sudah memulainya dengan sebuah program mendesak dan masif dari kerja-kerja yang berguna secara ekologis dan sosial: membangun kembali sistem transport publik, lebih banyak kereta api, bis, memperbaiki jalan dan lain-lain. Pembangunan jutaan rumah, jaminan sistem pembuangan limbah dan tersedianya air minum untuk setiap kota dan kampung. Dan coba kita juga membangun pemeliharaan kesehatan gratis bagi setiap orang lewat rumah sakit, klinik, dan sebagainya berdasarkan sistem kesehatan nasional. Pendidikan untuk semua orang dan tidak hanya untuk mereka yang mempunyai kondisi kehidupan yang baik.

Karena, menurut penulis jika proses transisi ini tidak dapat kita lalui dengan baik, ancaman yang akan kita hadapi tidak saja soal disintegrasi sosial, tapi juga akan hancurnya kerekatan sosial (*social bond*) dalam masyarakat. Bila kerekatan sosial hancur, akan tumbuh *social distrust* (iklim tidak saling mempercayai) di antara kelompok-kelompok sosial, sehingga kelompok yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat akan saling curiga, saling bermusuhan atau bahkan, yang paling mengerikan, adanya upaya untuk saling meniadakan. Dalam situasi ini, tawuran massal bukan lagi mitos. Dengan ini, kita sadar, bahwa peradaban mendapat arti pentingnya justru karena ia merupakan proses humanisasi yang terus berjalan, berjalan dalam kefanaan manusia.

Strategi Penguatan Basis Ekonomi (Soko Guru)

Menurut Carla Poli, “Ekonomi berasal dari kata-kata Yunani, *oikos* dan *nomos* yang terjemahnya adalah tata laksana rumah tangga.”⁹

Sedangkan menurut L. Robbins bahwa “Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya yang mempunyai berbagai kemungkinan penggunaan.”¹⁰

Dilihat dari perjalanan sejarah, dalam terminologi ekonomi kapitalis, pemerintah dilarang untuk campur tangan dalam masalah kegiatan ekonomi, dengan alasan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi hanya akan menimbulkan efek negatif atas keefektifan penggunaan sumber daya dalam masyarakat, karena efektifitas kegiatan ekonomi dalam pandangan mereka adalah; membiarkan setiap individu masyarakat untuk mengambil keputusan ekonominya sesuai dengan mekanisme pasar tanpa ada intervensi terhadap mekanisme tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, maka kaum ekonomi kapitalis sangat membatasi peranan pemerintah hanya dalam batas; bagaimana pemerintah berusaha mendapatkan pendapatannya untuk menutupi pengeluarannya yang sangat terbatas, yaitu dengan suatu mekanisme membagi beban tersebut kepada individu masyarakat dengan pola pembagian yang adil menurut mereka.

Runtuhnya Soviet sebagai sebuah kekuatan ekonomi, berakhirnya dominasi komunis dalam sistim ekonomi di Cina, disisi lain ketidak mampuan sistim kapitalis dalam menyusun tata ekonomi dunia baru, telah memunculkan rasa optimisme di kalangan sarjana-sarjana Islam akan segera wujudnya Islam sebagai sebuah sistim alternatif yang memberikan solusi pemecahan permasalahan pembangunan perekonomian dunia.¹¹

⁹ Corla Poli, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Malang: Gramedia, Cet. 11, 1994) h. 19.

¹⁰ T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Canisius, 1991) h. 13.

¹¹ Handi Risza Idris, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, 2018, www.sebi.ac.id/articla.com

Konsep Islam sangat jelas dalam pembangunan, selain memberikan panduan terhadap konsep pembangunan fisik, ekonomi Islam juga dengan tegas pembangunan manusia sebagai pelaksana pembangunan juga di tekankan, termasuk hubungan antara keduanya (Umer Chapra: 1993). Ada lima hal yang ditawarkan sebagai konsep dan strategi dalam pembangunan ekonomi Islam dan sekaligus menjadi ukuran dalam kebijakan ekonomi¹²:

1. *Pertama*, pembangunan sumberdaya manusia, dalam konsep ini yang menjadi fokusnya adalah bagaimana membangun keadilan *social* dalam ekonomi, reformasi konsep tenaga kerja, moral, pendidikan dan perilaku manusia sebagai konsumen.
2. *Kedua*, adalah konsep kepemilikan dalam konsep ini ditekankan aturan pembangunan dalam kepemilikan kekayaan, hubungan antara pengusaha, kecil, menengah dan besar dan juga restrukturisasi sistem keuangan dan optimalisasi peran zakat.
3. *Ketiga* adalah restrukturisasi ekonomi, yang berkaitan dengan persoalan kebijakan fiskal dan moneter, dimana Islam telah memberikan aturan yang jelas, selain itu permasalahan publik sector, moral hazard.
4. *Keempat*, perdagangan luar negeri, salah satu solusi Islam yang ditawarkan adalah selain barang-barang yang sudah jelas, juga mekanisme pembayarannya. Islam menawarkan sistem dinar emas yang memiliki ukuran yang sama sehingga tidak akan terjadi fluktuasi nilai mata uang.
5. *Kelima* adalah kebijakan politik ekonomi, karena semuanya akan terpulang dari politicalwill pemerintah, dan Islam memberikan aturan dan norma yang jelas dalam kebijakan politiknya.

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang kuat adalah tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang, sistem pembangunan ekonomi Islam telah memiliki dasar dan konsep

¹² Handi Risza Idris, 2018, www.sebi.ac.id/articla.com

yang jelas untuk menjadi sebuah sistem dan konsep ekonomi yang mapan dan kuat. Selain dasar syariah yang sudah mendapat jaminan dari Allah SWT, sistem ekonomi Islam sangat relevan diaplikasikan dalam kurun waktu yang tidak terbatas karena pada dasarnya Islam telah memberikan solusi terhadap pemecahan mendasar manusia, yang menjadi persoalan adalah konsistensi dan komitmen bersama untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam agar wujud dalam diri kita, masyarakat, bangsa dan negara bahkan dunia.

Strategi Penguatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan.

Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global.¹³

Menurut penulis, sudah saatnyalah pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan

¹³Didin S. Damanhuri, *SDM Indonesia dalam Persaingan Global*, 2018, www.sebi.ac.id/articla.com

asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya daya yang dimiliki dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.

Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Menurut penulis ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan *kultural*, *kurikulum sekolah*, dan *pasar kerja*. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan *link and match* mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide *link and match* yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam hal ini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya berbasis sumberdaya yang dimiliki, yakni kekayaan sumberdaya alam (SDA). Kalau strategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses pengulangan kegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luar negeri, teknologi, dan manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalam kerangka mikro hanya semakin memperkuat proses ketergantungan tersebut.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisi wilayah yang strategis (geo strategis), yakni sebagai negara kepulauan dengan luas laut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaat sumber kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi

pembangunan yang diciptakan tidak membangkitkan local genuin. Yang terjadi adalah sumber kekayaan alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab meskipun andaikata bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadap semua level IPTEK, namun apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak berbasis pada sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka ketergantungan ke luar akan tetap berlanjut dan semakin dalam.

Oleh karena itu harus ada *shifting paradimn*, agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Karena untuk apa SDM diciptakan kalau hanya akan menjadi perpanjangan sistem *kapitalisme ekonomi* dengan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional.

Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang diciptakan pemerintah.

Membangun Masyarakat Baru

Socrates membagi masyarakat menjadi tiga kelas:

Pertama, Pedagang yang bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya (nafsu).

Kedua, Prajurit yang bekerja memelihara tata masyarakat (semangat).

Ketiga, Filosof yang berfungsi sebagai penguasa (akal budi).¹⁴

Menghadapi situasi yang demikian memang sulit, sebab kita tidak mungkin keluar dari cengkeraman *kapitalisme* global karena Indonesia telah menjadi penandatangan APEC dan telah pula terdaftar sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (WTO). Yang paling mungkin untuk dilakukan adalah menerima keberadaan *kapitalisme* global secara sadar, kritis dan cerdas. Setelah itu langkah selanjutnya adalah merumuskan kepentingan kolektif Nasional dengan melihat potret besar konstelasi politik Internasional sebagai acuan, dengan tetap menjadikan kepentingan dan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 45 sebagai titik pijak bersama.¹⁵

Secara konseptual ada beberapa model sosi-ekonomi-politik yang saat ini berkembang di dunia, seperti :

- *Welfare-state* ala Eropa Barat daratan.
- *The third-way* ala Inggris.
- *Sosialisme-pasar* ala Cina (dengan pola satu negara dua sistem).
- *Kapitalisme-industrial-progresif* ala Amerika Serikat.
- *Kapitalisme-retail* ala India dan lain sebagainya.¹⁶

Semua konsep dan model diatas bisa dipilih untuk menjawab tantangan berat yang dihadapi oleh negara-negara Indonesia saat ini. Semua terpulang kembali pada setiap elemen dari warga bangsa Indonesia untuk menentukan pilihan, sudah tentu dengan memperhitungkan pula keberadaan sumber daya alam dan manusia, keadaan geografi, demografi, kultur, sistem nilai, kondisi social dan infrastruktur yang ada.

¹⁴ Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar, Teori, Kritik dan Nalar*, (Yogyakarta: KLIK®, 2001). h. 37

¹⁵ Hasyim Wahid, dkk, *Telikungan Kapitalisme Global*, h. 41

¹⁶ *Ibid....*, h 41

Massa Aksi (Gerakan Moral)

1. Pengertian Massa aksi

Dialektika model gerakan masa yang dilakukan dalam rangka pencapaian idealismenya antara “*gerakan moral*” dan “*gerakan politik*” untuk sebuah transformasi/perubahan sosial, maka gerakan moral adalah merupakan cara yang sesuai bagi rakyat tertindas. Massa aksi adalah aksinya rakyat tertindas untuk menuntut akan keadilan, aksi berarti perbuatan atau perjuangan entah itu demonstrasi, opinion building, menulis artikel dalam surat kabar, membangun/mengkonsolidir rakyat, dan lain-lain. Masa dapat melakukan aksi kalau ada penggerakannya, dalam sejarah jatuhnya sebuah rezim massa aksi selalu ada penggerakannya, kalau zaman ORLA dan ORBA motor penggerak itu adalah mahasiswa, yang akhirnya massa aksi terkonotasi dengan gerakan mahasiswa, Konsep yang sudah menjadi “*platform*” adalah bahwa aksi yang harus dilakukan harus merupakan kekuatan moral (*moral force*) merupakan kekuatan pendobrak, ketika terjadi kemacetan dalam sistem politik. Dan kenyataan inilah yang dihadapi massa aksi (gerakan mahasiswa) baik di dalam maupun diluar negeri, yaitu atas dasar konsep “gerakan moral” mahasiswa melakukan perubahan dalam masyarakat. Seharusnya gerakan mahasiswa itu adalah aksi massa dimana mahasiswa melakukan penyadaran kepada rakyat untuk turut serta berjuang bersama mahasiswa. Akan tetapi gerakan mahasiswa tidak lagi dikatakan sebagai gerakan elitis, tapi gerakan mahasiswa memang benar-benar gerakan rakyat (massa aksi).

Tan Malaka dalam “Massa-Aksi” (1926) berteriak lantang:

Selama orang percaya bahwa kemerdekaan akan tercapai dengan jalan ‘putsch’ atau ‘anarkisme’, itu halanyalah impian seorang yang lagi demam.

Dan mengembangkan kepercayaan itu diantara rakyat, satu perbuatan yang menyesatkan, disengaja atau tidak. Membuat ‘putsch’ di negeri seperti Indonesia (terutama di Jawa) di tempat kapital dipusatkan dengan rapinya dan dilindungi oleh militer dan mata-mata secara

Barat yang modern, dan sebaliknya di tempat rakyat yang masih mempercayai yang gaib-goib, takhayul dan dongengan samalah artinya dengan “bermain api”, tangan sendiri yang hangus. Hanya “Satu Massa-Aksi”, yakni satu massa aksi yang tersusun yang akan beroleh kemenangan di satu negeri yang berindustri sebagai Indonesia.¹⁷

Tan Malaka meyakini pentingnya revolusi di Indonesia. Menurutnya revolusi Indonesia sebagian kecil menentang sisa-sisa feodalisme dan sebagian terbesarnya menentang imperialisme Barat yang lalim. Ia juga didorong oleh kebencian bangsa Timur terhadap bangsa Barat yang menindas dan menghina mereka.

Karena itu, dalam konsep Tan Malaka, revolusi di Indonesia tidak digerakkan oleh faktor pertentangan kelas, tetapi oleh kekuatan ide. Jika kita mampu mengumpulkan dan memusatkan kekuatan-kekuatan revolusioner di Indonesia dengan jalan aksi massa yang terencana buat meretas jalan kemerdekaan nasional, maka kita butuh suatu partai yang revolusioner. Partai revolusioner adalah gabungan orang-orang yang sama pandangan dan tindakannya dalam revolusi. Dan sebaik-baiknya perbuatan revolusioner adalah tiap-tiap anggota bersama, satu dengan yang lainnya, dipusatkan.¹⁸

Dalam konteks Indonesia sebagaimana yang terjadi pada peristiwa sejarah sekitar tahun 1967, yakni mahasiswa “*membangun angkatan baru*” yang memiliki tugas menyelamatkan Indonesia dari dekadensi dan krisis. Selanjutnya hal ini disebut “manifesto mahasiswa” yang mencerminkan cita-cita dan ambisi kelompok mahasiswa. Filsafat aktivis mahasiswa pada waktu itu di umumkan secara jelas, dengan memperlihatkan ideologis militan, para pemuda ingin mentransformasi dunia nyata. Sejak semula mereka bermaksud menyerahkan opini dan

¹⁷ Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar, Teori, Kritik dan Nalar...*, sampul.

¹⁸ *Ibid*, h. 160

mempengaruhi masyarakat. Untuk bersama ikut serta digaris depan dalam mengadakan perombakan gelanggang rezim politik. Tetapi bukan semata-mata karena itulah pilihannya, namun disebabkan karena keterbatasan yang ada pada diri mahasiswa sendiri.

2. Paradigma Massa Aksi

Paradigma merupakan cara pandang yang mendasar dari seorang ilmuwan. Paradigma tidak hanya membicarakan apa yang harus di pandang, tetapi juga membicarakan inspirasi terhadap apa yang dilakukan. Sehingga membuat cara pandang seseorang dengan orang lain berbeda. Paradigma merupakan konsistensi teori dan pertanyaan serta pendekatan prosedur yang dikembangkan dalam rangka memahami sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan konsepsi dalam penafsiran realitas sosial tertentu. Esensi paradigma adalah sebuah model atau sebuah pegangan untuk memandu mencapai tujuan. Paradigma juga merupakan pegangan bersama yang dipakai dalam berdialog dengan realitas. Paradigma juga bisa disebut sebagai prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam dalam segenap pluralitas strategi sesuai dengan kondisi tertentu.

Dan dalam sejarahnya, gerakan rakyat selalu diwarnai paradigma jalanan dengan intelektual. Pertentangan ini yang kemudian dimaknai dengan paradigma gerakan politik dan gerakan moral yang termanifestasi dalam gerakan *politik-struktural*, dengan gerakan intelektual-kultural. Yang semestinya kedua kekuatan paradigma ini tidak perlu di pertentangkan oleh karena akan melemahkan gerakan mahasiswa itu sendiri. Walaupun dipertegas, bahwa komitmen sosial dan pilihan keberpihakan terhadap rakyat yang menjadi tolak ukur dalam pembentukan paradigmanya.

Kesimpulan

Sejarah telah mencatat bahwa penerapan agenda kapitalisme tidak pernah membawa kebaikan kepada dunia. Kegagalan ini wajar, karena ideologi ini lahir sikap traumatik terhadap agama, dan hanya bertujuan untuk menindas sesama manusia demi kepentingan bisnis pemilik modal. Oleh karena itu, sudah seharusnya ideologi kapitalisme ini masuk ke dalam museum sejarah kalam dunia, menyusul ideologi sosialisme yang telah masuk sejak tahun 1990-an.

Maka sesungguhnya harapan dunia saat ini hanya tinggal satu, yaitu Islam. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ideologi ini akan bangkit kembali ke muka bumi dan membawa umat ke arah yang jauh lebih baik. Umat Islam seharusnya sadar dan bersyukur karena masih merasakan indahnya keimanan Islam. Karena itu, janganlah kita mau ditekan dan dipaksa untuk menjauhkan diri dari Islam dan mengikuti ideologi asing yang sudah jelas kekufurannya. Janganlah kita meninggalkan agama yang mulia ini, karena hanya agama inilah yang benar dan dijamin kesempurnaannya. Jadikanlah hukum-hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1985, *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta).
- Damanhuri, Didin S., 2018, *SDM Indonesia dalam Persaingan Global*, www.sebi.ac.id/articla.com.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1984, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: YPPA).
- Hakim, Lukman, 2003, *Revolusi Sistemik*, (Malang: Kreasi Wacana).
- Hermawan, Eman, 2001, *Politik Membela Yang Benar, Teori, Kritik dan Nalar*, (Yogyakarta: KLIK®).
- Idris, Handi Risza, 2018, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, www.sebi.ac.id/articla.com.
- Poli, Corla, 1994, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Malang: Gramedia, Cet. 11).
- Baswir, Revrison, *Bahaya Ekonomisasi Neoliberal Bagi Negara-negara Miskin*, (Surabaya: FE Unair),
- Soekarno, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitya Penerbit).
- Soekarno, 1959, *Penemuan Kembali Jalannya Revolusi Kita*, (Pidato pada Tanggal 17 Agustus).
- T. Gilarso, 1991, *Pengantar Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Canisius).
- Wahid, Hasyim, dkk, 1999, *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS)